Makalah Pembahasan

Sikap dan Komitmen Stakeholder sebagai Dasar Penentu Keberhasilan dalam Penanganan dan Pengelolaan Pencemaran Wilayah Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu

Dr. Ir. Tri Prartono, MSc[7)]

PENDAHULUAN

Pencemaran perairan wilayah pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu merupakan suatu fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu khususnya, tetapi juga bangsa Indonesia umumnya mengingat kejadian ini berada di daerah strategis yaitu di Ibukota Negara Republik Indonesia. Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang menghasilkan bentuk-bentuk kebijakan pengelolaan termasuk masalah lingkungan laut akan menjadi barometer terhadap sistem mengelola lingkungan laut yang ada di tanah air ini. Dengan demikian, kegagalan terhadap penanganan pencemaran di sekitar wilayah pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sebenarnya menunjukkan ketidak-mampuan pemerintah dalam menangani/mengelola masalah-masalah lingkungan laut khususnya pencemaran laut.

PERMASALAHAN

Pembahasan masalah pencemaran di wilayah pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu sudah sering dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, namun mengapa persoalan pencemaran belum pernah tertangani dengan baik. Kejadian katastropik yang baru adalah bencana kematian masal ikan di Pantai Ancol dan sekitarnya pada Bulan Mei dan Oktober tahun 2004, dan bencana tumpahan minyak di Kepulauan Seribu. Secara umum keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan berbagai aspek seperti:

- Ketersediaan perangkat peraturan; perundangan.dan kelembagaan;
- Kondisi ekologi wilayah;
- Kondisi sosial masayarakat;
- Kondisi ekonomi;
- Ketersediaan teknologi;
- Keterkaitan dengan aspek teknis.

Pada kasus wilayah Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu pada dasarnya tidak memiliki kendala dalam rangka implementasi keenam aspek tersebut di atas. Sebagai contoh, benarkah masalah lingkungan di wilayah pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu tidak terdapat peraturan dan lembaga yang berwenang? Benarkah masalah ekologi belum diketahui? Benarkah kondisi sosial masyarakatnya tidak mendukung? Benarkah ekonomi kurang menunjang untuk penanganan pencemaran? Benarkah tidak tersedia teknologi pengendalian pencemaran dan aspek teknis?

Kegagalan penanganan dan pengelolaan pencemaran Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu pada dasarnya tidak adanya sinergi dalam menjalankan ke enam aspek di atas. Mengingat masalah penanganan dan pengelolaan pencemaran memerlukan suatu aksi atau tindakan, maka pemerintah memiliki kewajiban yang besar dalam penanganan pencemaran khususnya baik sebagai instruktor dan fasilitator bagi stakeholder. Dengan demikian, sebenarnya kegagalan penanganan dan pengelolaan pencemaran merupakan bagian dari kegagalan pemerintah dalam implementasi.

Ketidaksinergisan dalam penerapan aspek di atas untuk penanganan pencemaran menunjukkan pemerintah masih memberikan bobot satu aspek yang lebih dominan dibandingkan aspek lainnya.

[7] Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Ada kecenderungan bahwa sampai saat ini bahwa aspek ekonomi masih menjadi prioritas penting khususnya aspek ekologi. Hal ini mungkin masih adanya persepsi bahwa aspek ekologi tidak dapat memberikan nilai ekonomi.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada dasarnya tidak terlepas dari masalah cara pandang masyarakat Indonesia umumnya yang kurang memperhatikan geografis wilayah Indonesia. Sejak lama bahwa bangsa Indonesia mengetahui wilayah sacara fisik sebagai negara kepulauan, namun kenyataan konsep pemikiran darat masih menguat. Hal ini sangat jelas jika dilihat dari belum ada konsep jelas terhadap pengelolaan wilayah Teluk Jakarta yang secara administrative merupakan bagian dari tiga propinsi (Banten, DKI dan Jabar) dimana masing-masing memberikan andil besar terhadap masalah kerusakan perairan di Teluk Jakarta. Hal ini berarti upaya ketiga pemerintah provinsi dalam memberikan perhatian yang sama terhadap Teluk Jakarta menjadikan hal yang perlu dipertanyakan. Pemerintah DKI khususnya jelas sangat memiliki kepentingan, dan sudah melakukan berbagai upaya, namun dengan munculnya berbagai persoalan di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu memberikan indikasi bahwa upaya-upaya tersebut masih jauh dari optimal.

UPAYA-UPAYA PENANGANAN

Teluk Jakarta telah mengalami kerusakan sangat berat, berbagai bahasan telah sering dilakukan selama dua dasa warsa, maka tidak ada alasan lagi masyarakat untuk menunggu khususnya pemerintah.Teluk Jakarta harus segera ditangani. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah:

1. Membuat visi dan misi berbagai stakeholder dalam rangka menyatukan persepsi terhadap Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu yang dituangkan dalam bentuk komitmen;
2. Membuat suatu strategi nasional dan rencana aksi berbasis ekologi untuk penanganan dan pencegahan pencemaran di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu disertai dengan target-target baik jangka pendek, menengah dan panjang;
3. Membentuk suatu lembaga bersifat lintas sektoral dan kawasan dalam rangka implementasi strategi dan rencana aksi;
4. Memasukkan perbaikan Teluk Jakarta sebagai bagian dari indikator keberhasilan program pemerintah.